

## PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENCAPAI KESEIMBANGAN EKONOMI ISLAM DI MASYARAKAT

Putri Nurhidayah<sup>1\*</sup>; Hidayatunnisa<sup>2</sup>; Sandi Andika<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> putrinurhidayah0305@gmail.com; <sup>2</sup>hidayatunnisaa@gmail.com; <sup>3</sup>sandi.andika@gmail.com

<sup>1 2 3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

Received: April 2024

Revised: Mei 2024

Accepted: Mei 2024

### ABSTRACT

*This article discusses the role of public policy in achieving Islamic economic balance in society. The purpose of this study is to analyze how public policy can support the principles of Islamic economics, such as justice, equitable distribution of wealth, and avoidance of usury. The methodology used is a qualitative approach with case study analysis in several regions that implement Islamic-based economic policies. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders, as well as analysis of relevant policy documents. The results of the study indicate that public policies oriented towards Islamic economics can improve people's welfare through programs such as zakat, waqf, and sharia financing. In addition, policies that support the development of micro and small businesses have also proven effective in creating jobs and reducing economic disparities. The discussion underlines the importance of collaboration between the government, Islamic financial institutions, and the community to implement effective policies. This study also found that challenges such as lack of understanding of Islamic economics and unsupportive regulations still need to be overcome to achieve the desired balance.*

**Keywords :** Public policy, Economic balance, Islamic economics, Public welfare, Zakat, Wakaf

### Pendahuluan

Keseimbangan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ini, keseimbangan tidak hanya berarti stabilitas ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, di mana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, peran kebijakan publik menjadi sangat krusial. Kebijakan publik yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Taufikurrahman & Nabillah, 2024).

Kebijakan publik dalam konteks ekonomi Islam meliputi berbagai aspek, termasuk regulasi keuangan, pajak, perlindungan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika yang menjadi fondasi dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

\*Corresponding Author

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap ekonomi Islam telah meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta program-program sosial seperti zakat dan wakaf. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap ada, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi Islam, hingga regulasi yang belum sepenuhnya mendukung (Rusby, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang tepat dapat mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengkaji studi kasus di beberapa daerah yang telah menerapkan kebijakan ekonomi berbasis Islam, serta mendalami pandangan para pemangku kepentingan terkait efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu aspek penting yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam ekonomi adalah salah satu indikator keseimbangan yang diharapkan dalam ekonomi Islam. Kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inisiatif kewirausahaan akan menjadi fokus utama, karena sektor ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pentingnya pendidikan dan penyuluhan mengenai ekonomi Islam. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan (Markavia et al., 2022). Oleh karena itu, program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep seperti zakat, wakaf, dan investasi syariah perlu diintegrasikan dalam kebijakan publik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan implementasinya di lapangan. Seringkali, kebijakan yang baik tidak diikuti dengan tindakan yang sesuai, yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk koordinasi antara lembaga pemerintah, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari sektor swasta.

Dengan memahami peran kebijakan publik dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai ekonomi Islam dan kebijakan publik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

Secara keseluruhan, pentingnya kebijakan publik dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam tidak dapat dipandang sebelah mata. Kebijakan yang baik tidak hanya akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dinamika antara kebijakan publik dan keseimbangan ekonomi Islam, serta menawarkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran kebijakan publik dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam di masyarakat. Metode ini dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan (Balaka, 2022).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana peneliti akan menganalisis beberapa daerah yang telah menerapkan kebijakan ekonomi berbasis Islam. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan daerah yang memiliki program-program kebijakan publik yang relevan dengan ekonomi Islam, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta inisiatif zakat dan wakaf.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengelola lembaga keuangan syariah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap wawancara akan direkam dan transkripnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema penting.

Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen kebijakan, laporan penelitian terkait, dan literatur yang relevan mengenai ekonomi Islam dan kebijakan publik. Analisis dokumen ini akan membantu dalam memahami konteks dan kerangka kebijakan yang ada (Siyoto & Sodik, 2015).

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini mencakup pengkodean data, di mana peneliti akan menandai bagian-bagian penting dari transkrip wawancara dan dokumen yang relevan. Kemudian, tema-tema yang muncul akan diidentifikasi dan dikategorikan untuk memahami pola-pola yang ada dalam data (Rahmadi, 2011).

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan publik dapat berkontribusi pada keseimbangan ekonomi Islam di masyarakat, serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam di masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara analisis dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dampak signifikan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah hasil temuan yang terperinci dari penelitian ini (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

### 1. Penerapan Kebijakan Ekonomi Berbasis Islam

Kebijakan publik yang dirancang untuk mendukung ekonomi Islam meliputi beberapa aspek, antara lain:

#### a. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap UMKM merupakan salah satu strategi utama dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Program pemerintah yang memberikan pelatihan, akses pembiayaan, dan pemasaran produk telah membantu banyak pelaku usaha kecil untuk berkembang. Usaha kecil ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata.

#### b. Penerapan Zakat dan Wakaf:

Kebijakan yang mendorong pengumpulan dan distribusi zakat serta pengelolaan wakaf secara efektif telah menunjukkan dampak positif. Wawancara dengan pengelola lembaga zakat menunjukkan bahwa dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Ini membantu masyarakat yang kurang beruntung untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

#### c. Keuangan Syariah:

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga menjadi bagian penting dari kebijakan publik. Penelitian menemukan bahwa produk-produk keuangan syariah, seperti pembiayaan tanpa riba dan investasi sesuai syariah, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat penting bagi masyarakat yang menghindari sistem keuangan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

### 2. Dampak Kebijakan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang mendukung ekonomi Islam berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak yang teridentifikasi antara lain (Zulkifli et al., 2022):

#### a. Peningkatan Pendapatan:

Banyak pelaku UMKM melaporkan peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Program pelatihan dan akses ke pembiayaan yang lebih baik memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.

#### b. Pengurangan Kemiskinan:

Dengan adanya program zakat dan wakaf, banyak penerima manfaat yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan kini dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dana zakat yang digunakan untuk modal usaha dan pendidikan telah membantu keluarga-keluarga tersebut untuk keluar dari kemiskinan.

#### c. Kesetaraan Ekonomi:

Kebijakan publik yang mendukung distribusi kekayaan juga berkontribusi terhadap kesetaraan ekonomi. Dengan mengedepankan program-program yang

inklusif, masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan publik yang mendukung ekonomi Islam:

#### a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat:

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi Islam dan kebijakan yang ada. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk terlibat dalam program-program ekonomi berbasis syariah karena kurangnya informasi dan edukasi yang memadai.

#### b. Birokrasi yang Rumit:

Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam mengakses program bantuan atau pembiayaan sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam program-program yang seharusnya mendukung mereka.

#### c. Regulasi yang Belum Optimal:

Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung ekonomi Islam, beberapa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, masih adanya ketidakpastian hukum terkait produk-produk keuangan syariah yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut.

### 4. Rekomendasi untuk Kebijakan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat peran kebijakan publik dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam (Aprianto, 2016):

#### a. Edukasi dan Penyuluhan:

Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan penyuluhan tentang ekonomi Islam kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang menjelaskan manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### b. Penyederhanaan Proses Birokrasi:

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap program-program bantuan, perlu dilakukan penyederhanaan proses birokrasi. Hal ini dapat meliputi pembentukan satu pintu untuk pengajuan bantuan dan pembiayaan, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh prosedur yang rumit.

#### c. Peningkatan Kerjasama antara Sektor Publik dan Swasta:

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik. Kerjasama ini dapat mencakup pengembangan produk keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### d. Penguatan Regulasi:

Regulasi yang mendukung ekonomi syariah perlu diperkuat dan disesuaikan agar lebih jelas dan transparan. Ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik berperan penting dalam mencapai keseimbangan ekonomi Islam di masyarakat. Melalui kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pertumbuhan lembaga keuangan syariah, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan birokrasi yang rumit, perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan inklusif, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi Islam dan kebijakan publik. Dengan demikian, diharapkan keseimbangan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dapat tercapai, membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

## Referensi

- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18–43.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 73–96.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia*.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi)*.
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economy, Finance and Banking*, 6(May), 81–91.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Rusby, Z. (2017). *Ekonomi Islam* (p. 240).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Taufikurrahman, & Nabillah, D. (2024). Konsep Perdagangan Syariah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(1).
- Zulkifli, Wahab, A., & Habbe, H. (2022). KESEIMBANGAN PASAR DAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM. *Journal of Economis, Public and Accounting*, 4(2), 154–170.